

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Jensen dan Meckling (1976) menuturkan bila agency theory menjabarkan pemegang saham atau pemilik selaku prinsipal serta manajemen merupakan agen. Seiring dengan perkembangan permasalahan pada perusahaan, konflik agensi tidak hanya terjadi pada prinsipal dan agen saja melainkan terjadi juga pada pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas. Adanya permasalahan antara prinsipal dan agen terjadi pada perusahaan yang struktur kepemilikannya tersebar, berbeda dengan Indonesia yang merupakan negara di Asia yang struktur kepemilikannya terkonsentrasi. Dari adanya struktur kepemilikan yang terkonsentrasi tersebut maka permasalahan di Indonesia lebih cocok dijelaskan dengan teori agensi tipe 2.

Menurut Claessens dkk. (2000) konflik agensi tipe II menjelaskan bila pemilik saham sebagian besar akan mengutamakan kepentingan mereka, serta mengorbankan kepentingan pemegang saham minoritas yang mengarah ke tindakan ekspropriasi. Konflik antara pemilik saham minoritas dan pemilik saham mayoritas dapat muncul dikarenakan aktivitas transfer sumberdaya antar perusahaan sehingga pemegang saham minoritas akan rugi. Terkait dengan konflik agensi, good corporate governance memiliki fungsi dalam hal menumbuhkan kepercayaan investor terkait kepercayaan kepada perusahaan dalam menerima return atau dividen penanaman modal yang dilakukannya. Pengelolaan Perusahaan modal yang baik berhubungan dengan cara menumbuhkan kepercayaan investor bahwa perusahaan tentunya akan memberikan profit, kecurangan terhadap laporan keuangan tidak akan dilakukan oleh manajer, serta bagaimana investor melakukan pengawasan terhadap Tindakan manajemen (Shleifer dan Vishny, 1997) dalam (Hendayani & Yuyetta, 2022).

Teori agensi berpendapat bahwa pemisahan kekuasaan yang terjadi antara pemilik perusahaan dengan pengelola perusahaan akan memicu timbulnya upaya masing-

masing pihak untuk memaksimalkan kepentingannya. Teori keagenan disini dapat dijadikan pedoman bagi pemilik perusahaan untuk lebih yakin kepada manajer dalam mengelola return yang sudah diinvestasikan, dan meminimalisir terjadinya pelanggaran penyimpangan informasi untuk keuntungan manajer pribadi atau yang disebut dengan asimetri informasi (Sutedi, 2012:30).

Hubungan antara profitabilitas (ROA) dengan teori agensi adalah jika perusahaan baik maka para stakeholders yang terdiri dari kreditur, supplier, dan juga investor akan melihat sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan laba dari penjualan dan investasi perusahaan. Dengan baiknya kinerja perusahaan akan meningkatkan pula nilai perusahaan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi serta berhasil membukukan laba yang terus meningkat akan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut berkinerja baik, sehingga akan menciptakan respon yang positif kepada pemegang saham dan membuat harga saham perusahaan meningkat. Profitabilitas yang tinggi juga menunjukkan prospek perusahaan yang baik, sehingga akan menciptakan sentimen positif bagi pemegang saham dan nilai perusahaan akan meningkat (Febriany, 2019).

2.2 Profitabilitas

2.2.1 Definisi Profitabilitas

Profitabilitas dianggap sebagai indikator kualitas investasi, oleh karena itu diharapkan semakin tinggi profitabilitas akan membuat perusahaan termotivasi untuk mengungkapkan segmen operasi untuk mengurangi resiko yang merugikan bagi pengguna laporan keuangan. Singvi dan Desai (dikutip dari Muhammad dan Siregar, 2013) mengungkapkan bahwa sewaktu profitabilitas perusahaan sedang baik, maka manajemen memiliki motivasi yang lebih besar untuk mengungkapkan informasi dengan lebih detail untuk memberikan sinyal kepada pemegang saham bahwa mereka memiliki kinerja yang baik dan berharap agar mendapatkan kompensasi atas hal tersebut (Muhammad et al, 2020).

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari usahanya. Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang

diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi (Fahmi, 2014). Menurut (Almunawwaroh & Marliana, 2018), profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang dimana melalui profitabilitas ini perusahaan ini dapat mengetahui laba yang diperoleh saat ini dan yang akan datang. Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Rasio ini juga memberi informasi tentang ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari usahanya. Profitabilitas merupakan rasio yang memiliki daya tarik bagi pemilik perusahaan, yaitu pemegang saham dalam suatu perseroan (Salsabi, 2019). Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Rasio profitabilitas bertujuan mengukur efektivitas manajemen yang tercermin pada imbalan hasil dari investasi melalui kegiatan penjualan (Maalua, 2018). Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya (Indriani, 2018). Dalam menghasilkan laba yang maksimal bagi perusahaan dapat ditunjukkan dari kinerja perusahaan yang baik. Semakin tinggi tingkat profitabilitas maka perusahaan tersebut semakin bagus. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung memiliki tingkat hutang yang rendah (Ardini, 2023).

2.2.2 Rasio Profitabilitas

(Kasmir, 2014) menjelaskan bahwa hasil pengukuran dapat dijadikan sebagai alat evaluasi kerja manajemen selama ini, apakah mereka telah bekerja secara efektif atau tidak. Kegagalan atau keberhasilan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk perencanaan laba kedepan, sekaligus kemungkinan untuk menggantikan manajemen yang baru terutama setelah manajemen lama mengalami kegagalan. Semakin tinggi profitabilitas, maka semakin baik dan efisien perbankan tersebut,

karena untuk memperoleh profitabilitas yang besar diperlukan adanya aktiva produktif yang berkualitas dan manajemen yang solid.

Pengukuran profitabilitas digunakan untuk mengetahui seberapa besar laba atau profit yang dimiliki oleh perusahaan dalam menghasilkan sumber daya yang dimiliki perusahaan tersebut (Hery, 2014). Untuk mengetahui seberapa besar profitabilitas yang perusahaan hasilkan dapat melalui pengukuran rasio profitabilitas. Menurut (Hery, 2017) menyatakan bahwa rasio profitabilitas atau rentabilitas dapat diukur dengan:

1. Return on Aset (ROA), merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.
2. Return on Equity (ROE), merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas.
3. Net Profit Margin, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba bersih atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap penjualan bersih. Laba bersih sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara laba sebelum pajak penghasilan dengan beban pajak penghasilan. Yang dimaksud dengan laba sebelum pajak penghasilan di sini adalah laba operasional ditambah pendapatan dan keuntungan lain-lain, lalu dikurangi dengan beban dan kerugian lain-lain.
4. Gross Profit Margin, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba kotor terhadap penjualan bersih. Laba kotor sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara penjualan bersih dengan harga pokok penjualan. Penjualan bersih disini adalah penjualan (tunai maupun kredit) dikurangi retur dan penyesuaian harga jual serta potongan penjualan.

Dalam penelitian ini rasio profitabilitas yang digunakan adalah Return on Assets (ROA). Alasan memilih Rasio Return On Asset (ROA) adalah karena rasio ROA

dapat secara detail menjelaskan berapa laba yang berhasil diperoleh dari penggunaan aktiva. Rasio ROA mampu memberikan pengukuran laba perusahaan yang memadai atas keseluruhan efektifitas perusahaan (Horne dan Wachowiz, 2009:215). Rasio ROA dapat berguna untuk mengetahui keadaan posisi perusahaan dan berguna sebagai kepentingan kontrol maupun perencanaan perusahaan (Munawir, 2007:85).

2.3 Good Corporate Governance

Corporate governance merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan arah strategi dan kinerja suatu perusahaan. Good corporate governance memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran - sasaran dari suatu perusahaan dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja. Penerapan good corporate governance dapat mencegah kesalahan dalam pengambilan keputusan sehingga secara otomatis akan meningkatkan nilai perusahaan yang tercermin pada profitabilitas (Anjani & Yadhya, 2017).

2.3.1 Definisi Good Corporate Governance

Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) pengertian corporate governance merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditor pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan istilah lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Tujuan corporate governance adalah untuk menciptakan pertambahan nilai bagi seluruh pihak pemegang kepentingan. BCG (Indonesian Institute of Corporate Governance) mendefinisikan corporate governance sebagai suatu proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan Perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain.

Cadbury Comitee of United Kingdom “mendefinisikan corporate governance sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada stakeholders. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham dan sebagainya”. Eko Sudarmanto, dkk (2021:3) dalam (Nuridah et al., 2023)

Menurut Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2012, Corporate Governance yaitu suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Menurut Nugroho & Rahardjo (2014) Corporate Governance merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan arah strategi dan kinerja suatu perusahaan (Syamsudin et al., 2017). Sehingga GCG dapat disimpulkan sebagai salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efesiensi ekonomis yang meliputi serangkaian hubungan. Corporate governance merujuk pada sistem manajemen dan pengendalian perusahaan, sistem tersebut mengarahkan hubungan antara para pemegang saham perusahaan, dewan direksi, serta pihak manajemen senior (Horne and Wachowicz, 2012). Hubungan-hubungan ini memberikan kerangka kerja untuk menetapkan tujuan perusahaan dan pengawasan kinerja. Karenanya tiga kategori individu menjadi kunci utama keberhasilan tata kelola perusahaan, yaitu pemegang saham biasa yang memilih dewan direksi, dewan direksi perusahaan, para pejabat eksekutif puncak yang dipimpin oleh direktur utama (Wicaksono, 2018)

2.3.2 Prinsip Good Corporate Governance

Menurut (Selviana, 2020) setiap perusahaan dalam menerapkan GCG harus dilandaskan pada prinsip GCG. Prinsip Corporate Governance menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan, sebagai berikut:

1. Keterbukaan (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai perusahaan, yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat;
2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga kinerja perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien;
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat;
4. Kemandirian (*indenpendency*), yaitu keadaan perusahaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat; dan
5. Kesetaraan dan kewajaran (*fairness*), yaitu kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan didalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.

2.4 Komite Audit

Komite Audit yaitu komite kerja yang profesional dan independen yang dibentuk oleh Direksi yang bertugas mengawasi Direksi atau Direksi dalam menjalankan

fungsi pengawasan yang berkaitan dengan proses akuntansi, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan audit. Masyarakat. Penerapan tata kelola perusahaan di Indonesia (Ikatan Komite Audit Indonesia, dalam (Effendi, 2016:59) dalam (Pratama et al., 2022).

Untuk mencari data Komite Audit, ada dua alternatif yang bisa digunakan, yaitu dengan melihat di ringkasan kinerja perusahaan tercatat atau di dalam laporan keuangan tahunan (*annual report*), tepatnya di bagian Bab Profil Perusahaan.

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee*.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perusahaan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan.

8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi Perusahaan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

2.4.1 Komposisi Komite Audit

- Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Perusahaan.
- Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
- Jika diperlukan dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Komite Audit dapat mengangkat staf atau Sekretariat Komite Audit sesuai kebutuhan. Pengangkatan ini harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

2.5 Dewan Direksi

Dewan Direksi adalah sekelompok individu yang dipilih oleh pemegang saham untuk menjalankan pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan yang tertera di anggaran dasar. Dalam struktur perusahaan publik Indonesia, Dewan Direksi merupakan posisi ketiga tertinggi setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Dewan Komisaris. Posisi tertinggi dalam Dewan Direksi adalah Direktur Utama.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33 Tahun 2014, setiap perusahaan publik diwajibkan memiliki setidaknya 2 anggota Dewan Direksi, dengan salah satu di antaranya diangkat menjadi direktur utama atau presiden direktur. Para Direksi ini dipilih oleh pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Seorang anggota Dewan Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:

1. Anggota Dewan Direksi pada maksimal 1 perusahaan publik lain
2. Anggota Dewan Komisaris pada maksimal 3 perusahaan publik lain, dan/atau
3. Anggota Komite pada maksimal 5 komite di perusahaan publik lain, dimana anggota tersebut juga menjabat sebagai anggota Dewan Direksi/Dewan Komisaris

Direksi perusahaan berfungsi sebagai pimpinan perusahaan serta jabatan tersebut bertanggung jawab penuh akan aktivitas operasional suatu perusahaan. Dewan direksi adalah kumpulan direksi yang dikenal oleh presiden, dan dewan dapat dikatakan sebagai pusat atau fokus kegiatan perusahaan. “Dewan Komisaris mendapat informasi serta jawaban akan hal-hal yang disampaikan dari Dewan Direksi” (Effendi, 2016:26) dalam (Pratama et al., 2022).

Tidak ada peraturan yang menyeragamkan posisi-posisi dalam Dewan Direksi, namun biasanya terdiri dari Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur Keuangan, Direktur Operasi, dan Direktur Sumber Daya Manusia. Posisi-posisi ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan, seperti dengan adanya Direktur *Corporate Banking* di perusahaan perbankan.

Sesuai dengan namanya, para direksi memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Berikut adalah tanggung jawab dari beberapa direksi yang umum dimiliki oleh perusahaan publik:

1. **Direktur Utama:** memastikan pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) dalam perusahaan, menyelenggarakan dan memimpin rapat direksi, mewakili perusahaan di dalam maupun luar pengadilan.

2. **Wakil Direktur Utama:** menjalankan fungsi operasional perusahaan, memastikan kepatuhan hukum perusahaan, membantu Direktur Utama dalam menjalankan fungsi-fungsinya.
3. **Direktur Keuangan:** melakukan perencanaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan perusahaan — termasuk manajemen resiko.
4. **Direktur Operasi:** melakukan perencanaan, pengendalian, dan pengawasan operasional perusahaan — termasuk memimpin fungsi operasional perusahaan.
5. **Direktur Sumber Daya Manusia:** melakukan perencanaan, pengendalian, dan pengawasan kepegawaian — termasuk rekrutmen, penilaian kinerja karyawan, dan penghargaan.

2.6 Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya. Komisaris Independen menurut Agoes dan Ardana (2014) adalah sebagai berikut : Dewan Komisaris dan direktur independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (pemegang saham minoritas) dan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak mana pun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan.

Sedangkan menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) komisaris independen sebagai berikut : “Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak sematamata demi kepentingan perusahaan.”

Menurut Tricker (2009, dalam Lukviarman, 2016), menjelaskan bahwa peranan *Board of Directors* (BOD) sebagai *the governing body* untuk setiap entitas korporasi dengan peran utama berupa tanggung jawab yang berhubungan dengan seluruh keputusan dan kinerja organisasi tersebut. Komisaris independen memiliki tanggung jawab yang harus dilaksanakan untuk 14 mendorong diterapkannya *good corporate governance*.

Komisaris Independen sebagai organ utama dalam penerapan praktik GCG, dengan melihat fungsi yang dimiliki. Karenanya, sesuai dengan namanya Komisaris Independen, maka harus memiliki independensi dan menjalankan fungsinya yaitu sebagai fungsi pengawasan dan kepemimpinan yang merupakan hal dasar yang dibutuhkan dari perannya tersebut.

2.6.1 Metode Pengukuran Dewan Komisaris Independen

Menurut Djuitaningsih dan Martatilova (2012) pengukuran proporsi dewan komisaris independen adalah sebagai berikut : “Proporsi dewan komisaris independen diukur dengan rasio atau (%) antara jumlah anggota komisaris independen dibandingkan dengan jumlah total anggota dewan komisaris”.

Rumus tersebut berfungsi untuk mengetahui presentase proporsi dewan komisaris independen dengan membandingkan antara jumlah anggota komisaris independen dengan jumlah total anggota dewan komisaris. Menurut Haniffa dan Cooke (2002:33) apabila jumlah komisaris independen di suatu perusahaan semakin besar atau dominan, maka dapat memberikan power kepada dewan komisaris untuk meningkatkan kualitas pengungkapan informasi perusahaan. Komposisi dewan komisaris independen yang semakin besar dapat mendorong dewan komisaris untuk bertindak objektif dan mampu melindungi seluruh stakeholders perusahaan.

Komisaris independen diperlukan untuk meningkatkan independensi dewan komisaris terhadap kepentingan PDKI= x 100% 21 pemegang saham dan benar-benar menempatkan kepentingan perusahaan diatas kepentingan lainnya. Menurut Peraturan Pencatatan No.I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat

Ekuitas di Bursa, jumlah komisaris independen minimum 30% dari seluruh dewan komisaris.

2.7 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak institusi lain yaitu kepemilikan oleh perusahaan atau lembaga lain. Kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang terbentuk institusi seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk mengurangi agency conflict. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif. Dengan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi maka akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik yang dilakukan oleh pihak manajer serta dapat meminimalisir tingkat penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pihak manajemen yang akan menurunkan nilai perusahaan.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusi (Kadir, 2017). Kepemilikan institusional menyerahkan tanggung jawab kepada divisi tertentu untuk mengelola investasi perusahaan. Kepemilikan institusional yang memantau secara profesional perkembangannya akan mengakibatkan tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi maka potensi kecurangan dapat ditekan.

Investor institusional dapat mempengaruhi manajemen perusahaan dan dapat menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham. Hal tersebut disebabkan jika tingkat kepemilikan manajerial tinggi, dapat berdampak buruk terhadap perusahaan karena jika kepemilikan manajerial tinggi, manajer memiliki posisi yang kuat untuk melakukan kontrol terhadap perusahaan dan pihak pemegang saham eksternal akan mengalami kesulitan untuk mengendalikan tindakan manajer. Hal ini terjadi karena tingginya hak voting yang dimiliki manajer

Investor institusional dianggap mampu menggunakan informasi laba periode sekarang untuk memprediksi laba di masa yang akan datang dibandingkan dengan investor non institusional. Selain itu, kepemilikan perusahaan oleh pihak luar memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi perusahaan yaitu melalui kritikan atau komentar yang semuanya dianggap publik atau masyarakat (Randi, 2017). Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemilik institusi dan blockholders pada akhir tahun. Yang dimaksud institusi adalah perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, maupun lembaga lain yang bentuknya seperti perusahaan. Sedangkan yang dimaksud blockholders adalah kepemilikan individu atas nama perorangan diatas 5% yang tidak termasuk dalam kepemilikan manajerial. Pemegang saham blockholders dimasukkan dalam kepemilikan institusional karena pemegang saham blockholders dengan kepemilikan saham di atas 5% memiliki tingkat keaktifan lebih tinggi dibandingkan pemegang saham institusional dengan kepemilikan saham di bawah 5% (Sulistiani, 2015).

Kepemilikan institusional akan mengubah pengelolaan perusahaan yang awalnya berjalan sesuai keinginan pribadi menjadi perusahaan yang berjalan sesuai pengawasan (Dwiyani, 2017). Pengawasan yang efektif dari pihak institusi menjadikan pihak manajemen termotivasi untuk bekerja lebih baik dalam menunjukkan kinerjanya. Kepemilikan institusional dimungkinkan dapat meningkatkan untuk segera melaporkan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dari peraturan yang telah ditetapkan.

Kepemilikan institusional adalah merupakan proporsi saham yang dimiliki institusi pada akhir tahun yang diukur dengan presentase (Nabela, 2015:2). Kepemilikan institusional adalah presentase saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, dana pensiun, atau perusahaan lain (Nuraini, 2014:17). Dengan kata lain, kepemilikan institusional merupakan proporsi saham yang dimiliki pihak institusi seperti perusahaan asuransi, dana pensiun atau perusahaan lain yang diukur dengan presentase yang dihitung pada akhir tahun. Dalam hubungannya dengan fungsi monitoring, investor institusional diyakini

memiliki kemampuan untuk memonitoring tindakan manajemen lebih baik dibandingkan investor individual. Kepemilikan institusional mewakili suatu sumber kekuasaan (*source of power*) yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap keberadaan manajemen.

Kepemilikan institusional mempunyai fungsi penting dalam mengawasi manajemen karena dengan adanya kepemilikan institusional maka akan adanya dorongan tingkat pengawasan yang lebih baik. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional akan menjamin kemakmuran pemegang saham. Pengaruh kepemilikan institusional dalam menjadi pihak pengawas ditekankan dalam investasi yang cukup besar dalam pasar modal. Tingkat kepemilikan institusional yang besar akan menghasilkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga perilaku oportunistik manajer dapat berkurang.

Kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Beberapa kelebihan dari struktur kepemilikan institusional sebagai berikut (Permanasari, 2014):

1. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi.
2. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional maka akan mendorong peningkatan pengawasan terhadap operasional perusahaan yang lebih optimal. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba.

2.7.1 Pengukuran Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh institusi. Kepemilikan institusional merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengurangi

konflik kepentingan (Pasaribu, 2016:156). Kepemilikan Institusional adalah besarnya jumlah kepemilikan saham oleh institusi yang terdapat pada perusahaan (I Wayan, 2016:177). Sedangkan menurut Yuniati (2016:35) kepemilikan institusional adalah tingkat kepemilikan saham oleh institusi dalam perusahaan, diukur oleh proporsi saham yang dimiliki oleh institusional pada akhir tahun yang dinyatakan dalam persentase. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional akan menjamin kemakmuran pemegang saham. Pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik manajer.

2.8 Struktur Modal

Struktur Modal merupakan perimbangan antara penggunaan modal pinjaman yang terdiri dari utang jangka pendek yang bersifat permanen, utang jangka panjang dengan modal sendiri yang terdiri dari saham preferen dan saham biasa (Hidayat, 2021). Menurut Pelawi (2019) struktur modal merupakan proporsi atau perbandingan dalam menentukan pemenuhan kebutuhan belanja perusahaan, apakah dengan cara menggunakan utang, ekuitas, atau dengan cara menerbitkan saham. Struktur modal merupakan perbandingan antara total utang (modal asing) dengan total modal sendiri atau ekuitas. Struktur modal merupakan bagian dari struktur keuangan, karena struktur keuangan merupakan perimbangan antara total utang dengan modal sendiri (Hambali, 2019).

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan struktur modal adalah perimbangan antara penggunaan ekuitas atau modal sendiri dan pinjaman yang berasal dari utang jangka panjang maupun penerbitan saham yang digunakan sebagai pendanaan bagi perusahaan. Perusahaan perlu membentuk struktur modal yang optimal sehingga dapat meminumkan biaya modal dan biaya operasional

untuk meningkatkan laba bagi perusahaan dan memaksimalkan nilai bagi pemegang saham (Rodoni, 2014:129). Kebijakan struktur modal melibatkan adanya suatu pertukaran (trade off) antara risk and return. Penggunaan lebih banyak utang akan meningkatkan risiko yang ditanggung pemegang saham dan menyebabkan ekspektasi yang tinggi terhadap modal yang ditanamkan, oleh karena itu diperlukan struktur modal yang optimal (Halim, 2015:100).

Brigham dan Houston (2011:155) menyatakan dalam sebuah perusahaan selain berusaha membentuk struktur modal yang optimal, maka diperlukan untuk menetapkan sasaran struktur modal (target capital structure) terlebih dahulu. Jika rasio utang aktual di bawah tingkat sasaran, maka perusahaan akan menghimpun modal dengan menerbitkan utang, sementara jika rasio utang di atas sasaran, maka yang akan digunakan adalah ekuitas. Sasaran dapat berubah dari waktu ke waktu seiring dengan perubahan kondisi, tetapi pada suatu waktu, manajemen biasanya memiliki satu struktur modal yang menjadi acuan.

2.8.1 Faktor Yang Mempengaruhi Struktur Modal

Brigham dan Houston (2011:155) menyatakan terdapat empat faktor utama yang mempengaruhi keputusan struktur modal yaitu resiko usaha, posisi pajak perusahaan, fleksibilitas keuangan, dan konserfatisme atau keagresifan manajerial. Berikut merupakan uraian faktor-faktor penentu struktur modal, antara lain:

- 1) Resiko usaha, atau tingkat resiko inheren dalam operasi perusahaan jika perusahaan tidak menggunakan utang. Makin besar resiko usaha perusahaan makin rendah rasio utang optimalnya. Menurut Halim (2015:101) resiko bisnis merupakan keadaan yang berdampak negatif pada operasi atau profitabilitas perusahaan.
- 2) Posisi Pajak perusahaan. Salah satu alasan utama digunakannya utang adalah karena bunga merupakan pengurang pajak, selanjutnya menurunkan biaya utang efektif. Akan tetapi jika sebagian besar laba suatu perusahaan telah dilindungi dari pajak yang berasal dari penyusutan, maka bunga atas utang yang belum dilunasi, atau kerugian pajak yang dibawa ke periode berikutnya, akan menghasilkan tarif

pajak rendah. Akibatnya tambahan utang tidak memiliki keunggulan yang sama jika dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki tarif pajak yang lebih tinggi.

3) Fleksibilitas keuangan, atau kemampuan untuk menghimpun modal dengan persyaratan yang wajar dalam kondisi yang buruk. Manajer keuangan perusahaan diwajibkan untuk mengetahui mana yang lebih menguntungkan menghimpun dana melalui utang atau modal sendiri. Pasokan modal yang lancar dibutuhkan oleh operasi yang stabil. Ketika perusahaan mengalami kesulitan operasional, maka perusahaan akan lebih menghimpun utang dibandingkan dengan ekuitas.

4) Konservatisme atau kearifan manajerial. Beberapa manajer lebih agresif dibandingkan manajer lain, sehingga mereka lebih bersedia untuk menggunakan utang sebagai usaha meningkatkan laba. Faktor ini mempengaruhi sasaran struktur modal perusahaan (Brigham dan Houston 2011:155).

2.8.2 Komponen Struktur Modal

Riyanto (2013:144), membagi struktur modal yang terdiri dari dua komponen yaitu modal asing dan modal sendiri.

1) Modal Asing

Modal asing atau disebut modal pinjaman alias utang atau secara akuntansi disebut liabilitas. Liabilitas (liability) disajikan di dalam laporan posisi keuangan atau Neraca (Balance Sheet) sebelah kredit. Modal asing atau utang merupakan salah satu sumber pembiayaan eksternal yang digunakan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pendanaannya. Dalam pengambilan keputusan akan penggunaan utang ini harus mempertimbangkan besarnya biaya tetap yang muncul dari utang berupa bunga yang akan mengakibatkan semakin meningkatnya leverage keuangan dan semakin tidak pastinya tingkat pengembalian bagi pada pemegang saham biasa. Selanjutnya Riyanto, (2013:144) modal asing merupakan modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan dan bagi perusahaan yang bersangkutan modal tersebut merupakan utang yang pada saatnya harus dibayar kembali. Jadi modal asing merupakan modal yang digunakan

oleh perusahaan untuk kegiatan operasionalnya yang berasal dari luar perusahaan tersebut.

Modal asing atau utang sendiri alias Liabilitas terdiri dari 3 (tiga) golongan, diantaranya:

(a) Utang jangka pendek

Utang jangka pendek (Short-term Debt) secara akuntansi disebut utang lancar (current liability) termasuk modal asing yang memiliki jangka waktu maksimal satu tahun. Sebagian besar utang jangka pendek terdiri dari kredit perdagangan merupakan kredit yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan usahanya. Utang jangka pendek terdiri atas:

a) Utang Dagang

Utang dagang (Account Payable) adalah utang yang muncul akibat penjualan kredit dan dicatat sebagai piutang oleh pihak penjual dan utang oleh pihak pembeli. Utang dagang adalah salah satu jenis utang jangka pendek terbesar yang mencerminkan kurang lebih 40 persen dari kewajiban lancar di rata-rata perusahaan non-keuangan. Utang dagang adalah sumber pendanaan spontan, yaitu pendanaan yang terjadi dari transaksi bisnis biasa.

b) Utang Wesel

Utang Wesel (Notes Payable) adalah pengakuan utang atau pernyataan tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu yang akan datang. Utang wesel dicatat dan disajikan di dalam neraca perusahaan. Hanya utang wesel yang jatuh tempo dalam satu tahun atau kurang yang digolongkan sebagai kewajiban jangka pendek.

(b) Utang Jangka Menengah

Utang jangka menengah (Intermediate-term Debt) merupakan utang yang jangka waktunya adalah lebih dari satu tahun atau kurang dari 10 tahun. Jenis utama dari utang jangka menengah adalah :

a. Term Loan merupakan kredit usaha dengan umur lebih dari satu tahun dan kurang dari 10 tahun. Pada umumnya, term loan biasanya dilunasi

dengan angsuran tetap selama periode waktu tertentu. Term loan biasanya diberikan oleh bank komersil (*commercial bank*), perusahaan asuransi (*insurance*), dana pensiun (*pension funds*), lembaga pembiayaan pemerintah, dan supplier perlengkapan. Keuntungan dari term loan adalah term loan lebih baik karena tidak segera jatuh tempo dan peminjam memberikan jaminan pembayaran berkala yang mencakup bunga dan pokok pinjaman.

b. Leasing adalah alat atau cara untuk memperoleh jasa dari suatu aktiva tetap yang pada dasarnya sama seperti ketika kita menjual obligasi untuk mendapatkan jasa dan hak milik atas aktiva tersebut, bedanya leasing tidak termasuk hak milik.

(c) Utang Jangka Panjang

Utang jangka panjang (*Long-term Debt*) secara akuntansi disebut utang tidak lancar (*non-current liability*) merupakan utang yang jangka waktunya adalah panjang, pada umumnya lebih dari 10 tahun. Utang jangka panjang ini pada umumnya digunakan untuk membiayai perluasan perusahaan (ekspansi) atau modernisasi dari perusahaan, karena kebutuhan modal untuk keperluan tersebut termasuk dalam jumlah yang besar.

Adapun jenis utang jangka panjang adalah pinjaman obligasi dan pinjaman hipotik.

a. Pinjaman Obligasi

Pinjaman Obligasi (*Bond Payable*) adalah pinjaman jangka panjang dimana debitur menerbitkan surat pengakuan utang dengan nilai nominal tertentu. Pelunasan atau pembayaran kembali pinjaman obligasi dapat diambil dari penyusutan aktiva tetap yang dibelanjai dengan pinjaman obligasi dan keuntungan tersebut.

b. Pinjaman Hipotik

Pinjaman hipotik (*mortgage notes payable*) adalah pinjaman jangka panjang di mana pemberi pinjaman (kreditur) memiliki hak hipotik atas barang tidak bergerak, sehingga jika debitur gagal memenuhi kewajibannya, barang

tersebut dapat dijual dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk membayar tagihannya.

2) Modal Sendiri

Modal sendiri atau secara akuntansi disebut Ekuitas (*equity*) atau kekayaan bersih (*networth*) atau modal kepemilikan (*ownership capital*). Modal Sendiri atau Ekuitas (*equity*) disajikan di dalam laporan posisi keuangan atau Neraca (*Balance Sheet*) sebelah kredit. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan ditanamkan dalam perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Modal sendiri berasal dari sumber internal dan eksternal. Sumber internal berasal dari laba yang dihasilkan perusahaan. Sedangkan sumber eksternal meliputi modal yang berasal dari pemilik perusahaan. Modal sendiri dalam suatu perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) terdiri dari:

(1) Modal Saham

Saham adalah tanda bukti pengambilan bagian atau peserta dalam suatu Perseroan Terbatas (PT), dimana modal saham terdiri dari sebagai berikut:

a. Saham Biasa

Saham biasa (*Common Stock*) merupakan bentuk komponen modal jangka panjang yang ditanamkan oleh investor, dimana pemilik saham ini, dengan memiliki saham ini berarti ia membeli prospek dan siap menanggung segala risiko sebesar dana yang ditanamkan.

b. Saham Preferen

Saham preferen (*Prefferend Stock*) adalah bentuk komponen jangka panjang yang kompensasinya (dividen) dibayarkan lebih dahulu (utama) sebelum membayar kompensasi saham biasa.

(2) Cadangan

Cadangan disini dimaksudkan sebagai cadangan yang dapat dibentuk dari suatu keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan selama beberapa waktu yang lampau atau dari tahun yang berjalan sampai untuk memprediksi dimasa yang akan datang. Cadangan yang termasuk modal sendiri adalah:

- 1) Cadangan ekspansi
- 2) Cadangan modal kerja
- 3) Cadangan selisih kurs
- 4) Cadangan untuk menampung hal-hal atau kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga sebelumnya (cadangan umum) yang terjadi di perusahaan

(3) Laba Ditahan (*Retained Earnings*)

Keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan dibagikan sebagai dividen, dan sebagian lagi ditahan oleh perusahaan. Jika penahanan keuntungan tersebut sudah dengan tujuan tertentu, maka dibentuklah cadangan sebagaimana yang telah diuraikan. Jika perusahaan tidak memiliki tujuan khusus mengenai penggunaan laba tersebut, maka laba tersebut sebagai "laba ditahan".

2.8.3 Teori Struktur Modal

Kesejahteraan pemegang saham ditunjukkan oleh harga pasar per saham, yang pada akhirnya merupakan refleksi dari keputusan investasi, pendanaan dan manajemen aktiva. Struktur modal bagi pemegang saham dapat memberikan suatu informasi memadai mengenai bagaimana kepentingan mereka diakomodir oleh perusahaan.

1) Trade Off Theory

Pengertian trade-off secara luas adalah mengorbankan suatu manfaat atau kualitas demi meningkatkan salah satu aspek manfaat dan kualitas yang lain. Berarti perusahaan di sini mengorbankan pendapatannya untuk membayar bunga tetapi disisi lain bunga utang sendiri menguntungkan bagi perusahaan sebagai pengurangan pajak pemerintah dan sering digunakan untuk penghindaran pajak.

2) Pecking Order

Theory Pecking order theories merupakan suatu kebijakan yang ditempuh oleh suatu perusahaan untuk mencari tambahan dana dengan cara menjual

aset yang dimilikinya. Seperti menjual gedung, tanah, peralatan yang dimilikinya dan aset-aset lainnya, termasuk dengan menerbitkan dan menjual saham di pasar modal dan dana yang berasal dari laba ditahan (*retained earnings*). Pecking order theory menjelaskan mengapa perusahaan yang sangat menguntungkan pada umumnya mempunyai hutang yang lebih sedikit. Hal ini terjadi bukan karena perusahaan tersebut mempunyai target debt ratio yang rendah, tetapi disebabkan karena perusahaan memang tidak membutuhkan dana dari pihak eksternal.

3) Modigliani Miller (MM) Theory

Teori ini merupakan dikemukakan oleh Menurut Modigliani dan Miller (Irawan, 2018) di dalam jurnalnya yang berjudul *Corporate income tax and the cost of capital a correction* bahwa “nilai dari suatu perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh *expected return* setelah pajak tetapi juga *tax rate* dan *leverage*” (Modigliani dan Miller dalam Irawan, 2018). Teori ini memasukkan pajak perseorangan dan pajak perusahaan sebagai penghemat pajak atau *tax shield*. Teori ini menyatakan bahwa biaya bunga bermanfaat sebagai pengurang pajak. Perusahaan yang meningkat jumlah utang di dalam struktur modal akan meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan akan meningkat nilai perusahaan secara maksimal dengan menggunakan 100% pendanaannya melalui utang.

4) Equity Market Timing

Equity market timing adalah untuk mengeksploitasi fluktuasi sementara yang terjadi pada cost of equity terhadap cost of other form of capital. Menurut Baker dan Wurgler (Irawan, 2018), “Struktur modal adalah hasil kumulatif dari usaha melakukan equity market timing dimasa lalu”. Baker dan Wurgler menemukan bahwa “perusahaan dengan tingkat utang yang rendah adalah perusahaan yang menerbitkan equity pada saat market value tinggi dan perusahaan dengan tingkat utang tinggi adalah perusahaan yang menerbitkan equity pada saat market value rendah”.

5) Teori Keagenan (*Agency Approach*)

Teori keagenan atau teori agensi adalah teori yang menjelaskan tentang

hubungan kerja antara pemilik perusahaan (pemegang saham) dan manajemen. Keagenan. Menurut Ramadona (2016) “teori keagenan adalah teori yang berhubungan dengan perjanjian antar anggota di perusahaan”. Teori ini menerangkan tentang pemantauan bermacam-macam jenis biaya dan memaksakan hubungan antara kelompok tersebut. Manajemen akan berusaha memaksimalkan kesejahteraan untuk dirinya sendiri dengan cara meminimalkan berbagai biaya keagenan, hal tersebut merupakan salah satu hipotesis dalam teori agency. Oleh sebab itu, “perusahaan diharapkan akan memilih prinsip akuntansi untuk memaksimalkan kepentingannya dengan cara memilih prinsip akuntansi yang sesuai”.

2.8.4 Indikator Struktur Modal

Menurut Kasmir (2013:158) mengemukakan bahwa analisis struktur modal dapat dilakukan dengan berbagai ukuran, diantaranya adalah :

- 1) *Debt to Asset Ratio* (DAR),
- 2) *Debt to Equity Ratio* (DER)
- 3) *Long Term Debt to Equity Ratio* (LDER)

Berikut ini penjelasan dari masing-masing rasio di atas adalah sebagai berikut :

- 1) *Debt to Assets Ratio* (DAR) ini mengukur mengenai seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai dengan utang. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar jumlah pinjaman yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan perusahaan.
- 2) *Debt to Equity Ratio* (DER), rasio ini digunakan untuk mengukur pertimbangan antara kewajiban yang dimiliki perusahaan dengan besarnya modal sendiri. Rasio ini juga dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban membayar utang dengan jaminan modal sendiri.

3) *Long Term to Equity Ratio* (LDER), rasio ini menunjukkan perbandingan antara besarnya pinjaman jangka panjang dengan modal sendiri yang diberikan pihak pemilik kepada perusahaan.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan rasio debt to total equity (DER) untuk mengukur struktur modal perusahaan yang besarnya aktiva perusahaan yang dibiayai oleh kreditur dilakukan dengan cara membagi total utang jangka panjang dengan total ekuitas. Semakin tinggi debt ratio, semakin besar jumlah modal pinjaman yang digunakan di dalam menghasilkan keuntungan bagi perusahaan.

2.9 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah rangkuman beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian ini, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel digunakan	Hasil Penelitian
1.	Muhammad Riyandika, 2020	Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Profitabilitas pada Sektor Perbankan yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2017-2019	Variabel Independen : -Good Corporate Governance Variabel Dependen : -Profitabilitas	1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan secara parsial jumlah anggota Dewan Direksi berpengaruh positif signifikan

				terhadap profitabilitas (ROA) perusahaan perbankan 2. Hasil penelitian secara parsial, komposisi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) perusahaan perbankan 3. Hasil penelitian secara parsial,
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				Jumlah anggota Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) perusahaan perbankan.
2.	Reynaldi Anwar et al, 2021	Pengaruh Good Corporate Governance Dan Leverage Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	Variabel Independen : -Corporate Governance -Leverage Variabel Dependen : -Profitabilitas	Dari data yang diperoleh dan hasil pembahasan pada penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa variabel good corporate governance (X1) secara parsial tidak berpengaruh

				<p>terhadap profitabilitas perusahaan pada perusahaan perbankan di bursa efek Indonesia.</p> <p>Variabel leverage (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan pada perusahaan perbankan di bursa efek Indonesia.</p> <p>Berdasarkan hasil uji F pada</p>
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>analisis regresi data panel menunjukkan bahwa good corporate governance dan leverage memiliki pengaruh secara simultan terhadap profitabilitas.</p>
3.	<p>Esther Liana Rini Andriyani et al, 2022</p>	<p>Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan</p>	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Dewan Komisaris -Dewan Direksi -Komite Audit -Kepemilikan Institusional <p>Variabel Dependen :</p>	<p>Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Dewan Direksi berpengaruh signifikan</p>

			-Profitabilitas	terhadap profitabilitas perusahaan perbankan. Sedangkan Dewan Komisaris, Komite Audit dan Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan.
4.	I Gede Cahyadi Putra et al, 2022	Pengaruh Corporate Governance Terhadap Profitabilitas dan	Variabel Independen : -Good Corporate Governance	Hasil dari penelitian ini yaitu variabel corporate governance

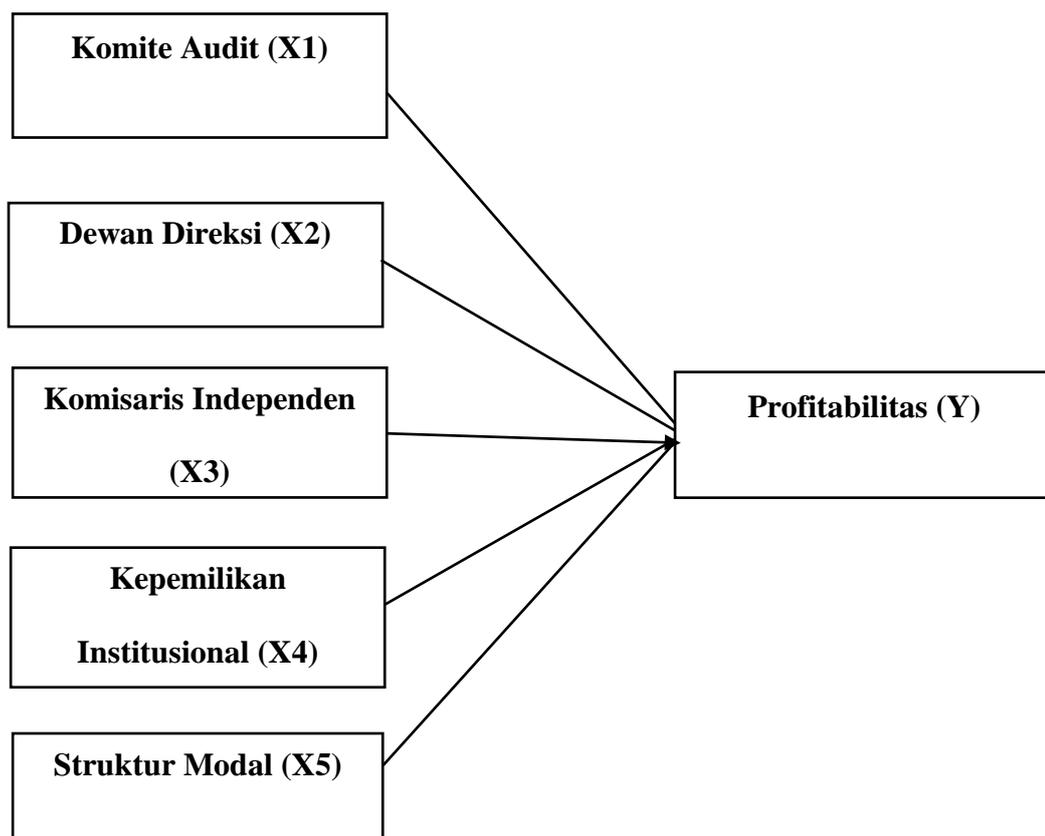
		<p>Nilai Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)</p>	<p>Variabel Dependen : -Profitabilitas</p>	<p>dan profitabilitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai perusahaan . Corporate governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Corporate governance berpengaruh secara tidak langsung dengan memiliki pengaruh yang</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				signifikan dan positif terhadap nilai perusahaan melalui profitabilitas
5.	Medianto Cahya Pratama, 2022	Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bei Periode Tahun 2014-2020)	Variabel Independen : -Dewan Komisaris -Dewan Direksi -Komite Audit -Kepemilikan Institusional Variabel Dependen : -Profitabilitas	Terdapat pengaruh Komite Audit, ”Dewan Direksi, ” Komisaris Independen dan” Kepemilikan Institusional secara simultan terhadap” Profitabilitas Perusahaan Sektor Perbankan yang terdaftar di

				”Bursa” Efek” Indonesia periode 2014- 2020.
--	--	--	--	------------------------------------------------------

2.10 Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Jadi secara teoritis dapat dijelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen. Berdasarkan kajian teoritis dan kajian penelitian terdahulu, maka penulis membuat kerangka berfikir berikut ini:



2.11 Bangunan Hipotesis

2.11.1 Penerapan Komite Audit Terhadap Profitabilitas

Komite Audit adalah Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Komite Audit memiliki pengaruh terhadap rasio profitabilitas Return on Equity. Meskipun saat perusahaan perbankan sedang mengalami penurunan, namun perusahaan-perusahaan perbankan tersebut masih mampu mengelola modal yang ada. Keberadaan Komite Audit dapat mengoptimalkan sebuah kinerja keuangan perusahaan sektor perbankan diakibatkan oleh kurangnya aktivitas yang tidak sehat dalam manajemen dan peningkatan kepercayaan penanam modal terhadap perusahaan sektor perbankan (Shanti, 2020).

Ukuran komite audit yang besar juga dapat meningkatkan kinerja perusahaan karena dapat memberikan hasil diskusi yang lebih detail kepada laporan keuangan perusahaan yang dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan perusahaan sehingga dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Semakin banyak anggota yang berada dalam komite audit maka profitabilitas perusahaan akan menurun karena komite audit akan mengalami masalah dalam pembagian tanggung jawab dan pengambilan keputusan yang dapat berdampak kepada efektivitas kinerja perusahaan (Satriadi, 2017).

Peneliti (Pratama, 2022) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap profitabilitas. Maka dapat ditarik kesimpulan untuk hipotesisnya sebagai berikut :

H1 : Komite Audit Memiliki Pengaruh Terhadap Profitabilitas

2.11.2 Penerapan Dewan Direksi Terhadap Profitabilitas

Dewan direksi adalah organ yang berperan krusial, yaitu mempertanggungjawabkan kepentingan perusahaan (Hendro dan Conny, 2014). Secara logis jumlah dewan direksi di suatu perusahaan bisa memengaruhi kecepatan pengambilan keputusan. Hal tersebut dapat memengaruhi penentuan keputusan perusahaan dikarenakan perlu terdapat pengorganisasian yang baik antardewan direksi. Penelitian terdahulu memaparkan bila makin banyaknya dewan

direksi pada perusahaan, berarti akan semakin banyak disimilaritas pendapat selama menerapkan kebijakan perusahaan. Hasil penelitian Anjani (2017) dalam (Hendayani & Yuyetta, 2022) Besar kecilnya rasio profitabilitas Return on Assets dipengaruhi pada jumlah Dewan Direksi dalam perusahaan. Beradanya Dewan Direksi dalam aktivitas perusahaan, maka akan mengoptimalkan kinerja perusahaan yang nantinya akan dilihat dari pencapaian kinerja perusahaan dan dapat diketahui dari kinerja keuangan perusahaan tersebut.

Peneliti (Pratama, 2022) menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh terhadap profitabilitas. Maka dapat ditarik kesimpulan untuk hipotesisnya sebagai berikut :

H2 : Dewan Direksi Memiliki Pengaruh Terhadap Profitabilitas

2.11.3 Penerapan Komisaris Independen Terhadap Profitabilitas

Komisaris independen berdasarkan teori agensi tipe II berperan krusial dalam menjaga keseimbangan kepentingan para pemilik saham mayoritas dan minoritas. Komisaris independen bisa berperan sebagai perwakilan dari pemegang saham minoritas, salah satu caranya dengan memutuskan atau mengeluarkan kebijakan komisaris yang tidak memihak kepentingan pemegang saham mayoritas (Hendayani, 2022). Penelitian milik Iqbal (2010) dan Herdianto (2013) memperlihatkan bila komisaris independen memengaruhi kinerja perusahaan secara positif (Hendayani & Yuyetta, 2022). Komisaris Independen memiliki pengaruh terhadap Return on Equity. Semakin besar jumlah komisaris independen dalam sebuah perusahaan akan lebih independen dalam memonitor kinerja suatu manajemen. Dengan demikian diharapkan kinerja manajemen perusahaan akan lebih meningkat dan nantinya akan meningkatkan profitabilitas sebuah perusahaan.

Peneliti (Pratama, 2022) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap profitabilitas. Maka dapat ditarik kesimpulan untuk hipotesisnya sebagai berikut :

H3 : Komisaris Independen Memiliki Pengaruh Terhadap Profitabilitas.

2.11.4 Penerapan Kepemilikan Instusional Terhadap Profitabilitas

Menurut Hendayani (2022) konflik di dalam teori agensi tipe II merupakan konflik antara prinsipal dengan prinsipal yaitu pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Proporsi kepemilikan institusional di dalam perusahaan merupakan kepemilikan saham yang cenderung tinggi. Ketika proporsi kepemilikan saham institusional semakin tinggi dapat memicu konflik dengan pemegang saham lainnya. Konflik tersebut akan berdampak buruk ketika pemegang saham mayoritas melakukan tindakan eksploitasi terhadap perusahaan yang dikendalikannya dengan biaya yang dipikul pula oleh pemegang saham lainnya, khususnya pemegang saham minoritas yang dapat mengakibatkan menurunnya kinerja perusahaan termasuk pula dapat menurunkan tingkat profitabilitas perusahaan.

Kepemilikan institusional merupakan faktor yang juga dapat mempengaruhi profitabilitas suatu perusahaan. Ali (2019) yang menyatakan kepemilikan saham oleh pihak institusional yang lebih besar daripada kepemilikan saham manajerial memungkinkan pihak institusional untuk menjadi controller atau yang mengawasi tindakan manajer sehingga manajer tidak bertindak sesuai kepentingannya sendiri dan membuat adanya kerjasama antara pihak institusional dengan manajer dalam meningkatkan kinerja perusahaan.

Peneliti (Pratama, 2022) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap profitabilitas. Maka dapat ditarik kesimpulan untuk hipotesisnya sebagai berikut :

H4 : Kepemilikan Institusional Memiliki Pengaruh Terhadap Profitabilitas

2.11.5 Penerapan Struktur Modal Terhadap Profitabilitas

Struktur modal optimal berguna untuk memaksimalkan laba perusahaan. Rodoni (2014:129) menyatakan struktur modal optimal mampu meminimumkan biaya modal dan biaya operasional sehingga dapat memaksimalkan laba perusahaan dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Salah satu cara untuk mencapai struktur modal yang optimal adalah menggunakan utang.

Kedua rasio utang Debt to Assets Ratio (DAR) dan Debt to Equity Ratio (DER) ini dapat digunakan untuk mengukur tingkat utang perusahaan dari tingkat penggunaan aset dan modal namun perusahaan juga harus mengetahui resiko yang diterima sesuai kondisi ekonomi perusahaan yang berdampak kepada laba perusahaan. Menurut teori pendekatan laba bersih dalam Sudana (2009:144) bahwa semakin banyak hutang jangka panjang yang digunakan dalam pembelanjaan perusahaan maka nilai perusahaan akan meningkat.

Peneliti (Hakim, 2018) menyatakan bahwa struktur modal berpengaruh terhadap profitabilitas. Maka dapat ditarik kesimpulan untuk hipotesisnya sebagai berikut :

H5 : Struktur Modal Memiliki Pengaruh Terhadap Profitabilitas